

POTRET PARTISIPASI POLITIK NU DI INDONESIA DALAM LINTASAN SEJARAH

Munawir Haris

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong

irfani.fanani@gmail.com

Abstract

Nahdlatul Ulama (NU) is one of the largest religious organization in Indonesia. The existence of NU can be traced from the colonial period to the present. This article will explain about NU, in terms of NU' enrollment since the colonial period until the reform era. In the colonial period, this organization was able to influence the colonial policy. Until now, NU also many participated in the Indonesian government. For example, in terms of policy planning, NU actively continues to control and regulate the government. The existence of NU is very significant. The founders of NU has brought social and political change in Indonesia. Since the colonial period NU had been had courage for pressing to colonial. In the reform era, NU even able to form a political party.

Keywords: Indonesia, NU, organization history

Abstrak

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Keberadaan NU bisa dilacak sejak masa kolonial sampai dengan saat ini. Artikel ini akan menjelaskan tentang perjalanan NU tersebut, terkait partisipasi NU sejak masa kolonialisme sampai era reformasi. Pada masa kolonial, organisasi ini mampu mempengaruhi kebijakan kolonial. Sampai saat ini, NU juga banyak berpartisipasi dalam pemerintahan Indonesia. Misalnya, dalam hal perencanaan kebijakan, NU secara aktif terus mengontrol dan mengatur pemerintah. Keberadaan NU sangat signifikan. Para pendiri NU telah membawa perubahan sosial dan politik di Indonesia. Sejak masa kolonial NU sudah memiliki keberanian menekan kolonial. Di era reformasi, NU bahkan mampu membentuk partai politik.

Kata kunci: Indonesia, NU, sejarah partisipasi

Pendahuluan

Konsep partisipasi politik dipahami sebagai suatu ke-aulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan bersama. Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat (Budiarjo, 1998:3). Dengan kata lain, penguatan politik rakyat mutlak diperlukan. Oleh karenanya, perbaikan sistem politik dan penegakan hukum menjadi syarat utama dalam membangun Indonesia baru yang lebih beradab, adil dan sejahtera

Sebagai salah organisasi terbesar di Indonesia, partisipasi Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut NU) tidak dapat dipandang sebelah mata. Keberadaan NU dari zaman ke zaman tidak pernah alpa dalam memperbaiki sistem perpolitikan yang ada. Reorientasi politik yang lebih memfokuskan kepada partisipasi politik masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka *chek and balances*, untuk mewujudkan *welfare state* (negara kesejahteraan). Dalam perjalanan organisasi NU selama ini, hal tersebut terjadi tidak sederhana. Banyak lika liku perjuangan yang luput dari perhatian masyarakat luas. Dari sejak lahirnya, NU sudah memperkenalkan visi dan misi dalam membangun bangsa dan negara yang moderat dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat (*shalihun likulli zaman wa makan*).

Dalam perkembangan politik di Indonesia, terlihat semakin semaraknya partisipasi politik masyarakat. Realitas ini wajar, mengingat setelah runtuhnya otoritarianisme orde baru dan lahirnya reformasi, kran demokrasi pun terbuka lebar, ekspresi politik rakyat kemudian bukan hanya melahirkan isu demokrasi *an sich*, tetapi membawa wacana-wacana baru dalam perspektif berbeda.

Secara teoritis, perilaku politik warga negara, setidaknya terdapat empat faktor utama partisipasi (Rush dan Althof, 1989:167):*pertama*, sejauh mana orang menerima perangsang

politik. Seseorang yang aktif, peka dan terbuka akan memacu untuk aktif dalam kegiatan politik. *Kedua*, karakteristik pribadi seseorang, kepribadian yang terbuka, sosiabel, *ekstrovert* cenderung melakukan kegiatan politik dibandingkan kepribadian yang *introvert*. *Ketiga*, karakteristik sosial seseorang, seperti status sosial, ekonomi, kelompok ras, jenis kelamin dan termasuk dalam organisasi akan mempengaruhi partisipasi politik seseorang. *Keempat*, keadaan politik atau lingkungan politik tempat seseorang dapat menemukan dirinya.

Untuk menjawab persoalan teoritis tersebut di atas, tulisan dalam artikel ini akan memotret kilas balik partisipasi politik NU dari masa pra kemerdekaan sampai era reformasi dewasa ini. Keberadaan organisasi ini, bukanlah “penumpang gelap” di era reformasi. Peran, andil dan pertisipasinya terlihat jelas di panggung sejarah bangsa Indonesia.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington adalah sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Huntington dan Nelson, 1990:6). Menurut Surbakti, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan (Surbakti, 1992:118). Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik, tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik. Perilaku politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1992:131). Perilaku politik merupakan produk sosial karena tidak dapat dipisahkan dari budaya politik atau bisa diartikan sebagai sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem tersebut (Almond dan Verba dalam Sastroatmodjo, 1995:12).

Huntington mengklaim, partisipasi politik sejak awalnya merupakan konsep yang asing dalam komunitas Islam. Jika ada partisipasi politik dalam masyarakat Islam, hematnya pasti berkaitan dengan afiliasi keagamaan, karena dalam Islam tidak ada perbedaan antara komunitas keagamaan dan komunitas politik. Para sarjana yang mempelajari partisipasi politik percaya, partisipasi politik adalah inti demokrasi. Verba, Schlozman, dan Brady bahkan berpendapat bahwa partisipasi warga negara adalah jantungnya demokrasi (Mujani, 2007:253). Sehingga, dapat dikatakan demokrasi tidak dapat dibayangkan tanpa kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses bernegara.

Partisipasi politik dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Jika seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan pada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud kolektif adalah kegiatan warga negara yang secara serentak untuk mempengaruhi penguasa. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi konvensional (seperti kegiatan pemilihan umum) dan non konvensional (agresif, seperti pemogokan yang tidak sah). Partisipasi tidak konvensional dibedakan menjadi dua, yaitu aksi yang kuat dan aksi yang lemah, aksi ini tidak menunjukkan sifat baik atau buruk. Dalam hal ini, kegiatan politik dapat dikategorikan kuat, apabila memenuhi tiga kondisi berikut, bersifat anti rezim dalam arti melanggar peraturan mengenai partisipasi politik normal, mampu mengganggu fungsi pemerintahan, dan harus merupakan kegiatan yang dilakukan oleh non elit (Hibb, 1978:7).

Sesungguhnya cara-cara yang ditempuh berbagai lapisan masyarakat dalam menuntut hak mereka terhadap negara merupakan kecenderungan ke arah partisipasi politik. Sedangkan cara untuk mendapatkan partisipasi politik, sangatlah berbeda di berbagai belahan negara. Myron Weiner berpandangan, terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik,

meliputi modernisasi, perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual, konflik di antara kelompok-kelompok politik dan komunikasi masa modern, konflik di antara kelompok-kelompok politik, serta keterlibatan pemerintah yang luas dalam berbagai bidang (Rahman, 2002:130-131).

Bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara, dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non-konvensional, termasuk yang mungkin legal maupun ilegal. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan tingkat kepuasan warga negara. Gabriel Almond juga menguraikan bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi dua; partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Partisipasi politik konvensional meliputi: pemberian suara, diskusi politik, kampanye, membentuk/bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif. Sedangkan partisipasi politik nonkonvensional meliputi: pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik dan perang gerilya atau revolusi.

Berdasarkan uraian teoritis di atas, penulis akan menganalisis bagaimana partisipasi organisasi NU di Indonesia dalam perhelatannya dengan kondisi yang ada dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Partisipasi Politik NU dalam Lintas Sejarah

Para peneliti ke-NU-an memiliki kecenderungan dan ketertarikan dalam mengkaji NU lebih menitikberatkan pada dinamika politik dan kekuasaan, dibanding kajian dari aspek sosial-intelektual atau pun keagamaannya. Meskipun harus diakui, dengan tingkat kegemukan anggotanya, perkembangan NU tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berikut potret partisipasi NU dalam lintas sejarah Indonesia.

1. Masa Kolonial Belanda

Pada masa ini, NU lebih bersikap *wait and see* atas kondisi perpolitikan nasional, dan ketika membuat sebuah pernyataan politik, NU bersikap mendukung pemerintah Belanda. Sedangkan Muktamar tahunannya lebih didominasi pada pembicaraan tentang masalah-masalah agama (Bruinessen, 1994:47). Namun hal tersebut, bukan berarti NU tidak memiliki ketegasan sikap terhadap pemerintahan kolonial. Ketegasan sikap tersebut baru muncul, jika Belanda turut campur dalam masalah agama. Sebagai contoh, pada tahun 1931 NU memprotes kebijakan yang menarik wewenang pengadilan agama tentang warisan yang kemudian memberikan otoritas kepada hukum adat (Feillard, 1999:16). Selain itu, secara tegas NU menolak sebuah rencana undang-undang perkawinan dan meminta supaya penghulu yang diangkat dengan pertimbangan dari ulama setempat, sebab merekalah yang dapat menguji kemampuan dan kualitas seseorang untuk jabatan penghulu (Haidar, 1994:94-95).

Pada tahun 1936 dalam Muktamar di Banjarmasin, NU memutuskan bahwa Indonesia merupakan *dar al-Islam* atau negara Islam (Masyhuri, 1977:138). Dengan persepsi, mayoritas penduduk negeri ini beragama Islam dan kawasan ini pernah diperintah oleh raja-raja Muslim. Ketidakpuasan NU serta organisasi-organisasi Islam lainnya terhadap kebijakan kolonial Belanda memunculkan keinginan untuk membentuk sebuah front bersama untuk meningkatkan komunikasi dan musyawarah secara teratur. Kesepakatan ini akhirnya melahirkan sebuah konfederasi Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) (Anam, 1985:102).

Hadirnya para aktivis muda NU, seperti Mahfud Siddiq dan Wahid Hasyim menjadikan NU semakin terlibat dalam perjuangan nasional. Ketika pada tahun

1939 partai-partai politik membentuk federasi bernama GAPI (Gabungan Politik Indonesia), para aktivis muda NU ini terbawa ke panggung politik sebagai wakil NU di MIAI yang mendukung seruan GAPI agar Indonesia berparlemen. Selain itu, MIAI melarang pemuda Indonesia ikut serta dalam pertahanan rakyat yang diorganisir Belanda atau mendonorkan darahnya bagi tentara Belanda (Anam: 1985:102). Selain itu, NU berkembang dengan pesat pada masa penjajahan Belanda. Tahun 1935, NU memiliki 68 cabang dengan 67.000 anggota. Tiga tahun kemudian, dengan 99 cabang dan berkembang ke luar Jawa yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

2. Masa Penjajahan Jepang

Sebuah lembaran baru dimulai pada bulan Maret 1942, ketika Dai Nippon menggantikan pendudukan Belanda. Mulanya, kedatangan Jepang disambut baik oleh seluruh bangsa Indonesia (Benda, 1980: 135). Tetapi kemesraan itu, segera berubah menjadi kebencian setelah diketahui bahwa Jepang tidak lebih baik dari kolonial Belanda. Jepang jauh lebih kejam, brutal dan tidak segan-segan menghukum orang yang dianggap bersalah.

Sejak awal di Indonesia, Jepang telah menjadikan urusan keislaman sebagai prioritas untuk ditangani. Bahkan sebelum barisan propagandanya bergerak, sudah ada beberapa prajurit Jepang berseragam mengikuti shalat Jum'at di sebuah Masjid di Jakarta, yang mengejutkan lagi adalah Kolonel Horie berpidato di Masjid Kwitang dengan didampingi Muhammad Abdul Muni'm Inada, seorang Jepang beragama Islam (Benda, 1980:142). Pada akhir Maret 1942 sudah didirikan sebuah kantor urusan agama pusat (*Shumubu*) (Kuntowijoyo, 1997: 22).

Para penguasa Jepang sejak awal lebih menunjukkan minat untuk mendekati para pemimpin Islam daripada merekrut kalangan nasionalis. Dengan mempersepsikan, para Kyai yang memimpin pesantren merupakan pendidik masyarakat pedesaan, pihak Jepang berharap dapat menjadikan mereka sebagai propagandis yang paling efektif. Sebagai imbalannya, mereka memberikan berbagai kemudahan dan pelatihan bagi para kyai, seperti mengajarkan sejarah, kewarganegaraan, olahraga dan bahasa Jepang.

Hubungan para pemimpin Islam di Indonesia dengan pihak Jepang, secara keseluruhan tampak lebih baik dibanding dengan Belanda. Hubungan dengan Jepang mengalami benturan ketika Jepang meminta rakyat Indonesia melakukan *seikeirei*, acara ritual berupa membungkukkan badan ke arah kaisar Tenno Haika, yang dipercaya sebagai keturunan Dewa Matahari, di pagi hari. Ritual ini ditentang oleh umat Muslim, karena dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid.

Protes terhadap paksaan tersebut muncul dimana-mana. Akibatnya, K.H. Hasyim Asy'ari sendiri mendapatkan hukuman empat bulan penjara dari pemerintah Jepang. Ia dituduh sebagai dalang kerusuhan di pabrik gula Jombang. Sebuah alasan yang direkayasa Jepang, dengan alasan yang sebenarnya adalah dikarenakan beliau menolak *seikeirei* (Khuluq, 1999:96). Kasus ini kemudian mendapatkan protes keras dari pejabat NU yang dilayangkan kepada Jepang (Anam, 1985:119).

Protes tersebut ditanggapi secara serius oleh Jepang, karena khawatir semakin merebak sehingga menghilangkan simpati terhadap mereka. Akibat kekhawatiran itu, maka Kyai Hasyim dibebaskan pada tanggal 18 Agustus 1942. Pemerintah Jepang pada tanggal 10 September 1943 secara resmi mengakui NU

dan Muhammadiyah serta memberikan kelonggaran untuk beraktivitas setelah pada 15 Juli 1942 melarang semua gerakan sosial dan politik. Di samping itu, Jepang membentuk pasukan Pembela Tanah Jawa (PETA) pada tanggal 3 oktober 1943 yang melibatkan kaum santri. Pemerintah Jepang mulai menyertakan pemimpin-pemimpin nasionalis sekuler untuk berpartisipasi dalam arena politik agar terjadi keseimbangan kekuatan diantara masyarakat Indonesia, serta menarik sebanyak mungkin dukungan terhadap Jepang (Khuluq, 1999:99).

Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dibentuk oleh Jepang pada 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI (Anam, 1985:122). Pengurus Masyumi didominasi oleh anggota NU dan Muhammadiyah. K.H. Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin dan wakilnya dijabat oleh Wahid Hasyim dan Mas Mansur (Bruinessen, 1994:55). Masuknya kedua organisasi besar ini diharapkan mampu memobilisasi massa yang besar guna mendukung Jepang melawan sekutu.

Pada tanggal 13 Maret 1944, K.H. Hasyim Asy'ari diangkat menjadi *Shumubu* menggantikan Prof. Husein Djajadiningrat. Dalam melaksanakan tugas harian, biasanya diwakilkan kepada putra beliau K.H. Abdul Wahid Hasyim yang saat itu menjabat sebagai *Chuo Sangi-in*, yaitu legislatif buatan Jepang. Dia kemudian meminta Jepang melatih para santri di pesantren yang kemudian melahirkan pasukan Hizbullah dan Sabillillah, yang dipusatkan di Cibarusa Jawa Barat, selama enam bulan pada tahun 1944. Setelah mengikuti pelatihan, para anggota laskar ini kemudian menjadi pengajar pemuda Islam di daerah masing-masing. Akhirnya, menjadikannya besar dan tersebar luas, terutama di Jawa dan Madura.

3. Masa Kemerdekaan

Peristiwa bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 merupakan peristiwa paling bersejarah. Kondisi itu, mampu mengubah dan menentukan peperangan dengan menyerahnya Dai Nippon kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 (Jasamihardja dkk., 1998: 13). Disisi lain, kekejaman bom atom Amerika tersebut menjadi berkah bagi rakyat Indonesia, mengingat dengan runtuhnya Jepang, bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat menyatakan proklamasi kemerdekaannya.

Meski demikian, bukan berarti penjajahan Jepang serta merta berakhir di bumi Nusantara. Kontak-kontak senjata antara tentara Jepang dan pasukan pejuang Republik Indonesia kerap terjadi (Kuntowijoyo, 1997:47). Namun yang lebih berbahaya dan menjadi ancaman paling nyata adalah masuknya kembali Belanda di Jakarta tanggal 29 September 1945 yang membongceng pasukan sekutu disinyalir hendak meneruskan kembali kolonialisme di Indonesia, membuat rakyat Indonesia sadar kemerdekaan bukanlah pemberian, tetapi harus diperjuangkan (Jasamihardja dkk., 1998:43).Melihat gelagat tersebut, maka pimpinan NU memanggil cabang-cabangnya se-Jawa dan Madura guna menentukan sikap terhadap kehadiran Belanda. Pada tanggal 21-22 Oktober 1945 digelarlah pertemuan para konsul di kantor PBNU yang dipimpin langsung oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Pada akhirnya, mengeluarkan sebuah resolusi yang isinya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia supaya bertindak tegas terhadap Belanda sekaligus berjuang *fi sabilillah* untuk mempertahankan kemerdekaan.

Resolusi ini mendapat legalitas lebih kuat pada Muktamar NU yang berlangsung di Purwokerto tahun

1946. Di dalamnya, dikemukakan alasan-alasan NU mengambil jalan Jihad, yaitu pada saat itu NICA telah datang dan berusaha melakukan beberapa kejahatan serta mengganggu keamanan masyarakat (Bruinessen, 1994:59). Apa yang dilakukan NICA adalah mencoba untuk mengganggu pemerintahan, sementara yang diproklamirkan sebagai Republik Indonesia dan menghina agama.

Sikap pasif pemerintahan RI pada saat itu, (peristiwa agresi militer sekutu) merupakan salah satu alasan NU mengeluarkan resolusi jihad. Selain itu, menandakan pengakuan NU sepenuhnya atas eksistensi pemerintahan RI. Pada masa revolusi ini, NU seringkali menampilkan wajahnya yang radikal, berkali-kali pula melancarkan kritik kepada pemerintah karena bersedia menandatangani perjanjian Linggarjati dan Renville dengan Belanda.

Dampak resolusi jihad ini, sangat dahsyat. Mengingat pesan yang dikandungnya adalah bertempur melawan Belanda adalah sebuah kewajiban (Anam, 1985:130). Akhirnya, menggema dengan hebat diseluruh Jawa dan Madura, terutama di Surabaya semangat jihad melawan tentara sekutu dan NICA membara di mana-mana. Pondok-pondok pesantren telah berubah menjadi markas Hizbullah dan Sabilillah (Bruinessen, 1994:60). Dua minggu setelah kedatangan Inggris di Surabaya, tepatnya pada tanggal 10 November 1945, sebuah perang besar pecah (Jasamihardja dkk., 1998:43), pertempuran yang terjadi selama 15 hari ini terdapat pengikut NU yang terlibat aktif di dalamnya (Khuluq, 1999:111).

Dalam realitasnya, posisi Kyai NU tidak hanya sebatas penggerak dan aktor perang suci, namun posisinya sebagai pemimpin spiritual diyakini memiliki kelebihan-kelebihan, berupa kekuatan untuk member-

kati orang dan membuat mereka kebal dari peluru dan senjata tajam (Anam, 1985:131). Tidak sedikit yang memperoleh jimat dari seorang Kyai yang memiliki kemampuan seperti itu.

4. Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, aspirasi NU di pentas politik tersalurkan melalui Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang dibentuk beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Tepatnya, pada bulan November 1945 sebagai hasil dari keputusan Mukhtar Islam Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945. Keputusan ini, menegaskan Masyumi merupakan satu-satunya partai bagi umat Islam Indonesia (Noer, 1987:47). Namun, keterlibatan NU di Masyumi tidak berlangsung lama, pada 15 April 1952, NU memutuskan keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai Papol. Wahid Hasyim, ketua umum PBNU pada waktu itu, memandang organisasi yang dipimpinnya telah semakin condong kepada perancangan politik. Tokoh-tokoh muda, seperti Idham Chalid, Saifuddin Zuhri, Ahmad Syaichu dan lain-lain, semakin menggerakkan sayap dalam ranah politik.

Puncaknya, ujian atas keputusan tersebut terjadi pada tahun 1955, di mana NU sebagai partai politik pertamakali mengikuti pemilu. Hasilnya di luar dugaan, partai baru ini menduduki posisi ketiga setelah PNI dan Masyumi.

5. Masa Orde baru

Secara historis, agama telah memerankan peranan yang sangat besar, dalam merangsang aksi sosial dan politik untuk melawan kekuasaan politik dan ideologi negara yang sangat dominan. Selama periode kolonial, banyak sekali gerakan sosial yang berdasarkan agama dan ditujukan untuk mengingkari hegemoni negara dan

menegakkan ruang sosial dan politik mereka, kendatipun sebagian besar gerakan ini tidak terorganisir dengan baik dan tidak sistematis, tetapi signifikansinya sebagai perlawanan sosial dari masyarakat keagamaan (dalam hal ini masyarakat pesantren), tidak bisa diabaikan. Gerakan-gerakan ini memperlihatkan kemampuannya untuk melawan ideologi dominan dan praktek-praktek negara (Hikam, 1996:142).

6. Masa Reformasi

Runtuhnya rezim Orde baru yang berkuasa selama 32 tahun, memberikan dinamika baru dalam atmosfer perpolitikan nasional. Terutama dengan adanya perombakan Undang-undang kepartaian yang memberikan ruang baru bagi partisipasi warga negara dalam membentuk partai politik. Kondisi ini, tidak disiasikan oleh para politisi nasional, baik yang sudah berpengalaman atau pun yang belum, pendatang baru maupun hanya sekedar coba-coba mengadu peruntungan meraih kekuasaan lewat jalur demokrasi kepartaian. Tingginya animo masyarakat luas, dapat dibuktikan dengan banyaknya partai politik yang lahir; seperti cendawan di musim hujan. Dengan berbagai latar sosial politik, baik yang beridentitas agama maupun nasionalis mendirikan partai. Sebuah kewajaran, mengingat sebagai partai politik, tentu saja anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki visi misi dan orientasi yang sama (Gani, 1987:113).

Tekanan yang dilancarkan rezim Orde baru terhadap aktivis Islam seakan menemukan momentumnya untuk meledak di era Reformasi. Seiring dengan dicabutnya asas tunggal Pancasila, gairah tersebut menemukan katarsis untuk mewujudkannya dalam bentuk partai politik. Bahkan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) salah satu partai warisan Orde

baru yang tadinya berasaskan Pancasila, berganti menjadi berlandaskan asas Islam.

Tekad untuk meng-*khittah*-kan NU guna menjaga jarak dengan politik dan kekuasaan, nampaknya mulai menipis, tradisi berpolitik yang sudah mendarah daging pada warga NU, terutama para elitnya, sulit untuk direm. Abdurrahman Wahid, sebagai seorang tokoh utama gerakan kembali ke *khittah* 1926, akhirnya tergoda untuk mendirikan partai politik yang kemudian bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Meskipun NU sendiri menyatakan tetap utuh dan independen sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di luar politik praktis dan konsisten pada keputusan Mukhtar ke-27 di Situbondo mengenai *khittah* 1926. Namun, kelahiran PKB atas rekomendasi langsung dari PBNU memberi sinyal kuat akan keinginan NU untuk berkiprah atau minimal memiliki bahtera sendiri dalam mengarungi samudra perpolitikan Indonesia yang sedang bergelora (Asmawi, 1999:21). Terlebih pembentukan PKB melalui proses penggodakan oleh Tim Lima, bentukan PBNU sendiri (Salim dkk., 1999:231). Harus diakui, desakan ini datang dari *grass-root* kalangan Nahdliyyin sendiri yang menginginkan partai politik yang sejalan dengan ideologi mereka, mengingat banyaknya partai politik Islam yang bermunculan, namun yang benar-benar mampu mengafiliasi kepentingan kalangan Islam tradisional sangat minim. Bahkan PPP sendiri, di dalamnya terdapat faksi NU, namun elit-elit parpol tersebut lebih didominasi dan dikuasai oleh kalangan modernis. Menurut penulis kondisi inilah yang sebenarnya memaksa elit NU (PBNU) untuk membentuk partai politik baru tersebut.

Dukungan PBNU terhadap PKB ternyata tidak sia-sia, partai tersebut tercatat partai paling banyak

menjadi saluran aspirasi warga NU (Salim dkk., 1999:231). Di tingkat nasional, suara PKB menduduki lima besar peraih suara, mengalahkan suara partai-partai berbasisan massa Islam lain, seperti PPP, PAN dan PK. Keberhasilan ini cukup wajar, mengingat mesin politik PKB merupakan kyai-kyai NU penguasa “kerajaan-kerajaan kecil”, seperti pondok pesantren memiliki massa loyal kultural dari para santri, komunitas pesantren, pendukung dan simpatisan mereka (Ismail, 1999: 43). Meski dukungan PBNU terkonsentrasi ke PKB, tidak menjamin massa NU secara otomatis ke partai tersebut. Tidak sedikit pula suara Nahdliyyin yang tersebar di beberapa partai lain seperti Golkar, PDI-P, PPP dan parpol lain, mengingat PBNU sebagai pengurus organisasi massa NU, tidak mewajibkan secara tertulis afiliasi umatnya hanya ke dalam salah satu partai politik tertentu (PKB). Hal ini bisa dibuktikan dengan perolehan suara PKB, meskipun memiliki suara yang signifikan, tetapi tidak mencerminkan kekuatan massa NU yang sebenarnya. Mengingat sebagai ormas terbesar di Indonesia, diprediksikan lebih dari 32 juta orang, seharusnya suara PKB mampu meraup suara lebih besar, apabila semua warga NU memilih partai tersebut.

Penutup

Partisipasi politik dipercaya sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya pendidikan. Di negara-negara maju, pendidikan tinggi dapat membuka akses bagi seseorang terhadap informasi tentang persoalan-persoalan politik, kemudian dapat mengembangkan kemampuan analisisnya, sehingga melahirkan minat dan kemampuan berpolitik. Selain itu, faktor penting mempengaruhi proses partisipasi politik adalah pendapatan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi, status, dan organisasi (Budiarjo, 1998:10).

Partisipasi politik adalah upaya *check and balances* sebuah kebijakan dalam sebuah negara. Partisipasi NU sebagai organisasi terbesar pertama di Indonesia, tidak bisa dianggap remeh. Dalam catatan sejarah, jejak organisasi ini tidak pernah absen. Partisipasi yang dilakukan sejak zaman penjajahan, terlihat jelas dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial, bahkan merepotkan mereka. Seperti yang dijelaskan di atas, NU tidaklah diam dengan kondisi yang ada. Upaya-upaya serius dilakukan untuk membela hak-hak masyarakat dan umat beragama. Pengerobanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NU tidak sedikit, sehingga nyawa pun akan rela dikorbankan. Pemaksaan ideologi kolonialisme mendapat halangan dari tokoh-tokoh NU. Hal ini terlihat dari pemaksaan untuk menghoramati tradisi *Siekeirei* yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai akibatnya, K.H. Hasyim Asy'ari, sebagai ketua PBNU ketika itu akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi yang isinya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, supaya bertindak tegas terhadap Belanda sekaligus menyatakan berjuang *fi sabilillah* guna mempertahankan kemerdekaan. Dampak resolusi jihad ini, sangat dahsyat mengingat pesan yang dikandungnya adalah bertempur melawan Belanda merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Pondok-pondok pesantren telah berubah menjadi markas Hizbullah dan Sabilillah yang digerakkan oleh para Kyai untuk melawan kolonialisme di Indonesia. Setelah kemerdekaan pun, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Penumpang gelap datang mengatasnamakan demokrasi ikut berkoar menyerukan ikut berpartisipasi dalam membangaun bangsa dan negara.

Kemerdekaan bukanlah hadiah gratis dari para penjajah, tetapi telah banyak korban dan pengorbanan yang dilakukan oleh para tokoh bangsa, termasuk tokoh-tokoh NU. Hanya saja, di era reformasi seringkali semua masyarakat berebut kursi dan jabatan semata-mata tanpa melihat kontribusi dari elemen masyarakat beragama ketika itu. Walaupun di era reformasi, lahirnya partai PKB adalah upaya serius yang dilakukan oleh

tokoh-tokoh NU untuk ikut serta dalam mengontrol kebijakan pemerintah Indonesia.

Daftar Rujukan

- Amin, M. Masyhur. 1995. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*. Ttp: al-Amin Press.
- Anam, Choirul. 1985. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Sala: Jatayu.
- Asmawi. 1999. *PKB, Jendela Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Alih bahasa Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bruinessen, Martin Van. 1994. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fealy, Greg dan Greg Barton. 1997. *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama dan Negara*. Yogyakarta: LKiS.
- Feillard, Andree. 1999. *NU vis a vis Negara: Pencarian Bentuk, Isi dan Makna*. terj. Lesmana. Yogyakarta: LKiS.
- Gani, Soelistyati Ismail. 1987. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Haidar, Ali. 1994. *Nahdlatul Ulama dan Islam; Pendekatan Fiqh dalam Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hibb Jr., Douglas A. 1978. *Mass Political Violence*. New York: Wiley.
- Hikam, Muhammad AS. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Huntington, Samuel P.???*The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail, Faisal. 1999. *NU, Gusdurisme dan Politik Kyai*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jasamihardja, Sutopo dkk.1998. *19 Desember 1948, Perang Gerilya Perang Rakyat Semesta*. Jakarta: Media Aksara Grafia.
- Karim, Gaffar. 1995. *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Khuluq, Latiful. 1999. *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: LKiS.

- Kuntowidjoyo. 1997. *Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang*. Surakarta: Yayasan Bhakti Utama.
- Marijan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Surabaya: Erlangga.
- Masyhuri, M. Aziz. 1977. *Masalah Keagamaan; Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*. Surabaya: PP Rabithah Ma'hadil Islamiyah.
- Milbarth. "Political Participation" dalam Michel Rush dan Philip Althof. 1989. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Rahman, Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia dalam Prespektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC.
- Rumadi. No. 6 tahun 1992. "Wacana Intelektualisme NU: Sebuah Potret Pemikiran", *Jurnal Tashwirul Afkar*. Page 56-73
- Salim, Hairus., Uzair Fauzan dan Umar Ibnu Sholeh (ed.). 1999. *Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999*. Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.